

MANAJEMEN PANTI PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TERLANTAR

Mutrofah¹

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 2221200019@untirta.ac.id

Abstrak : Keberhasilan suatu lembaga maupun organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan ditentukan oleh kemampuannya dalam mengimplementasikan fungsi fungsi manajemen secara profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen panti perlindungan sosial anak terlantar yang dilakukan di UPTD Perlindungan Sosial Provisi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Perlindungan Sosial, 1 kasi pelayanan dan penerimaan anak terlantar, 2 Pendamping Sosial dan, 3 Anak Terlantar. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa Manajemen Panti Sosial Anak Terlantar di UPTD Perlindungan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi Banten dapat dikatakan sudah baik, semua pegawai terutama pendamping sosial ikut serta menjalankan manajemen dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, hingga pengawasan kegiatan anak terlantar dengan baik serta menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial dengan baik Akan tetapi tidak luput dari kekurangan yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam proses pelayanan.

Kata Kunci : Manajemen, Panti Perlindungan, Anak Terlantar.

Abstract : *An institution's success in providing services is determined by its ability to implement management functions professionally. This research was conducted at the Banten Provincial Social Protection UPTD. This research use descriptive qualitative approach. The informants in this research were the Head of the UPTD for Social Protection, 1 head of services and reception for abandoned children, 2 Social Assistants and 3 Neglected Children. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation. Based on the findings in the field, the Management of Social Homes for Abandoned Children at the Social Protection UPTD at the Banten Province Social Service can be said to be good, all employees, especially social assistants carry out management from the beginning of planning, implementation, organizing and supervising neglected children's services properly and carrying out all assistance methods well. However, this does not escape shortcomings, namely the lack of human resources (HR) in the service process.*

Keywords : Management, Protection Home, Abandoned Children.

PENDAHULUAN

Persoalan anak terlantar masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Di Indonesia perkiraan jumlah anak terlantar dari segala penjurur mencapai 4,1 juta jiwa. Provinsi Banten termasuk salah satu wilayah yang memiliki kasus penelantaran anak yang cukup tinggi.

Wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kota dan empat kabupaten dan memiliki jumlah penduduk lebih dari 12 juta penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Banten jumlah anak terlantar pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 15,89% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 84,061 anak terlantar. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 97,416 anak terlantar. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,01% dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 111,215 anak terlantar. Dan pada tahun 2022 jumlah anak terlantar di Provinsi Banten sekitar 141,027 anak terlantar yang berarti mengalami peningkatan sebesar 18,50% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 119,014 anak terlantar. Hal ini menandakan bahwa setiap tahun jumlah anak terlantar di Provinsi Banten mengalami peningkatan sekitar 13,89% setiap tahunnya. Anak terlantar merupakan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari pemerintah karena mengalami berbagai kondisi yang menyebabkan mereka mengalami kerawanan sosial. Keterlantaran pada anak kerap terjadi karena ketidakmampuan sebagian orang tua dalam memenuhi kebutuhan serta menjalankan kewajibannya dalam menjaga dan mengurus anak. Sehingga kebutuhan dasar seperti kebutuhan sosial, rohaniyah maupun jasmani mereka tidak terpenuhi secara wajar seperti anak-anak yang lainnya.

Kelangsungan hidup anak terlantar menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memelihara dan memenuhi kebutuhannya, seperti yang dinyatakan pada Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Yang dimaksud anak terlantar dalam pasal tersebut adalah anak yang masih dibawah umur 18 tahun dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan fisik ataupun sosialnya. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa “salah satu tujuan dari pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yang dimaksud dengan kesejahteraan umum yakni kesejahteraan semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali”. Kesejahteraan menjadi tujuan negara dan juga menjadi tanggung jawab pemerintah kita untuk dapat menjaga dan memastikan seluruh rakyat Indonesia dalam kondisi sejahtera termasuk anak terlantar. Program kesejahteraan anak merupakan program prioritas nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan anak terlantar adalah dengan mendirikan balai rehabilitasi dan Panti Perlindungan Sosial sebagai wadah dalam memberikan penanganan pada anak terlantar yang tidak mendapatkan haknya termasuk kasih sayang orang tua. Penanganan yang diberikan adalah pemenuhan

kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan (Permensos No 4 tahun 2020:12)

Panti Sosial merupakan “lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.” (Permensos No 4 tahun 2020:5)

Panti perlindungan menjadi salah satu lembaga sosial yang memberikan pengasuhan, pendampingan, pembinaan dan perlindungan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan secara khusus, anak yang mengalami keterlantaran, yatim piatu, anak yang mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang salah agar mereka mendapatkan hak kasih sayang dan kehidupan yang layak baik dari segi ekonomi, sosial bahkan pendidikan sebagaimana mestinya.

UPTD Perlindungan Sosial yang beralamat di Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Dimana merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Banten yang memiliki tugas serta tanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada anak terlantar, dan lansia terlantar, membantu mereka untuk memperoleh pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan juga jaminan sosial.

Salah satu pelayanan kebutuhan dasar anak terlantar yang diberikan adalah pendidikan, Layanan pendidikan dan keterampilan dari pihak UPTD Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten merupakan program pemerintah dalam bidang pembangunan pendidikan melalui jalur sekolah dan luar sekolah. Anak-anak yang menjadi dampingan di balai berumur antara 4-18 tahun, dan sebagian besar mereka adalah anak yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi yang rendah, tidak bersekolah dan putus sekolah. Anak-anak berjumlah 25 anak. Program layanan pendidikan yang diberikan meliputi pendidikan formal dan juga pendidikan non formal meliputi bimbingan belajar, mengaji dan kegiatan lainnya dan diberikan pada anak dengan tidak dipungut biaya akan tetapi peneliti menemukan beberapa permasalahan, antara lain terbatasnya jumlah sumber daya pendamping untuk membantu melaksanakan program pelayanan di UPTD. Sedangkan jumlah anak terlantar penerima manfaat lebih banyak sehingga mengharuskan para pegawai untuk bekerja secara multitasking, dan belum terdapat pelatihan keterampilan bagi anak yang dapat dijadikan sebagai bekal ilmu yang dapat dipergunakan ketika selesai menerima layanan.

Hal ini perlu adanya evaluasi terkhusus di pelayanan pendampingan karena masih adanya kendala kurangnya tenaga pendamping. Dari hal ini pastinya membuat tujuan UPTD Perlindungan sosial belum bisa mencapai apa yang menjadi tujuan sesuai dengan harapan. Maka dari itu diperlukan manajemen pengelolaan panti sosial karna keberhasilan pendampingan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen yang optimal serta kemampuan maupun ketrampilan yang dimiliki oleh pendamping agar tujuan dan sasaran dari organisasi atau lembaga akan jelas dan terarah dengan baik. maka perlu adanya penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengeorganisasian, penggerakan dan pengawasan atau evaluasi kepada para anak-anak panti untuk mencapai keberhasilan pemberian pelayanan kepada anak terlantar di dalam panti perlindungan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan manajemen panti perlindungan sosial anak terlantar di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Januari-Februari di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Sosial Provinsi Banten yang berada di Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dapat menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai situasi kondisi dari data yang dikumpulkan mengenai masalah yang di teliti yang terjadi dilapangan. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer yakni kepala UPTD Perlindungan Sosial, pendamping sosial, dan anak terlantar. serta data sekunder berupa kajian literatur, artikel, jurnal dan situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara, obervasi dan dokumentasi. dengan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen panti perlindungan sosial anak terlantar di UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten, maka dengan demikian peneliti dapat menganalisa data dari hasil penelitian melalui teori yang sudah ada. pada dasarnya panti perlindungan sosail merupakan tempat berlindungnya anak-anak kurang beruntung seperti anak yatim, piatu duafa bahkan anak yang terlantar yang serba kekurangan termasuk materi. Di panti perlindungan anak di asuh, di beri bimbingan, pendidikan, serta di arahkan agar

menjadi kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Panti perlindungan sosial merupakan salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak, diman setiap lembaga pasti tidak terlepas dari manajemen, setiap lembaga memerlukan manajemen dalam pengelolaannya. Termasuk panti perlindungan anak terlantar yang pasti nya membutuhkan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dimana setiap tahapan harus bertanggung jawab terhadap pembagian tugas yang telah diamanahkan untuk mencapai tujuan panti. berikut ini analisa dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh peneliti yaitu sebagai berikut :

Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen dimana perencanaan sangat di butuhkan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Perencanaan disebut sebagai jembatan yang mampu menjadi penghubung antara keadaan sekarang dan harapan yang akan terjadi di masa yang akan datang. (Mubin, 2020). UPTD perlindungan sosial dalam memberikan pelayanan arahan sangat memahami apa yang harus dilakukan dimasa mendatang maka dari itu perlu perencanaan diberbagai aspek, dengan perencanaan yang matang maka pegawai, pendamping, maupun pengasuh dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, dengan siapa mereka akan bekerja dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Abd. Rohman (2013) mengatakan bahwa perencanaan merupakan langkah awal dan fungsi yang paling mendasar yang harus dilalui dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam perencanaan UPTD Perlindungan Sosial Provinsi Banten mengklasifikasikannya perencanaan ke dalam dua bentuk perencanaan yakni perencanaan jangka pendek dan rencana jangka panjang.

Perencanaan jangka pendek difokuskan untuk memberikan pelayanan kepada anak, dapat di rasakan secara langsung kepada anak yaitu pemberian pelayanan sandang, pangan, papan pendidikan dan kesehatan. Sedangkan program jangka panjang di tekankan pada peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan fasilitas serta sarana prasarana panti perlindungan sosial dengan mengupayakan fasilitas yang tersedia agar menjadi lingkungan yang ramah dan layak anak.

Panti UPTD perlindungan sosial provinsi banten memiliki program yang direncanakan untuk anak asuh di dalam panti yang berisi kegiatan yang dikerjakan oleh anak anak pada setiap harinya. Antara lain bimbingan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan jasmani. Kegiatan

harian yang dilakukan bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik, mental dan sosial anak terlantar agar dapat lebih percaya diri dalam menjalankan aktifitas kesehariannya. Selanjutnya pihak panti perlindungan sosial mengatakan bahwa pelayanan bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau biasa disebut dengan SPM, sehingga dalam memberikan pelayanan sudah ada pedoman yang mengaturnya. Untuk memperlancar kegiatan yang dilakukan memerlukan anggaran yang besar, pembiayaan UPTD di dapatkan dari beberapa donatur dan APBD dimana jumlah anggarannya bersifat fluktuatif (tidak pasti)

Dalam hal ini perencanaan yang dilakukan UPTD perlindungan sosial sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan visi dan misi, tujuan UPTD yang sudah ditetapkan. Dengan perencanaan yang matang yang dilakukan UPTD perlindungan sosial para anak telantar dapat merasakan kehidupan yang layak. Akan tetapi masih mengalami beberapa kendala, di antaranya adanya perencanaan yang belum terealisasi karna kurangnya anggaran sehingga pihak UPTD harus benar benar memilih program yang benar benar bisa di realisasikan

Pengorganisasian (Organizing)

Menurut George R. Terry “Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan (Syahputra & Aslami, 2023)

Pengorganisasian sangat penting dilakukan untuk mengatur sumber daya manusia atau sumberdaya lainnya. Fungsi pengorganisasian pada dasarnya berkaitan dengan suatu organisasi agar dapat berfungsi dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain pengorganisasian adalah suatu kegiatan untuk menentukan apa yang harus di lakukan, bagaimana dan siapa yang akan mengerjakannya. dalam proses pengorganisasian UPTD Perlindungan Sosial telah memiliki struktur formal yang terdiri atas Kepala, tata usaha, Seksi penerimaan dan penyaluran, Seksi pelayanan dan perawatan serta kelompok jabatan fungsional.

UPTD perlindungan sosial memiliki 45 orang pegawai yang terdiri dari ASN sebanyak 9 orang dan Staff non ASN 36 orang, seksi penyaluran 5 orang, seksi pelayanan dan perawatan

16 orang dan TU 15 orang jadi jumlah pegawai 45 orang. Dan pegawai di dalam panti UPTD perlindungan sosial ada pengasuh, pendamping, juru masak, driver, perawat yang nantinya memberikan pelayanan langsung kepada client yang ada di dalam panti.”

Di dalam panti UPTD perlindungan sosial pegawai telah di tempatkan sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing dan telah di tempatkan sesuai dengan keterampilan serta keahlian yang mereka miliki. Pengorganisasian yang dilakukan mengutamakan komunikasi antar pegawai, kerjasama antar pendamping dan saling belajar satu sama lainnya.

Penggerakan (Actuating)

Di dalam manajemen, perencanaan dan pengorganisasian saya tidak cukup jika dalam pelaksanaan tidak dilakukan dengan optimal, dalam penggerakan sumber daya yang ada perlu kerja keras, kerja cerdas, komunikasi, koordinasi dan juga kerjasama semua pihak. Fungsi penggerakan dalam manajemen sangatlah penting, sebab diantara fungsi manajemen lainnya penggerakan adalah aktifitas yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan. Setelah perencanaan, dan pengorganisasian di susun dengan baik dan sesuai dengan posisi yang di tugaskan maka langkah selanjutnya adalah penggerakan. Dalam pelaksanaan semua kegiatan organisasi tentusaja harus ada penggerakan dari pimpinan, hal ini sangat diperlukan karna penggerakan berarti adanya pengarahan, bimbingan dan juga komunikasi yang terarah. Hal ini harus dilakukan secara rutin, terarah dan terstruktur

Dalam proses penggerakan yang dilakukan oleh kepala UPTD perlindungan sosial selalu memberikan motivasi motivasi dan juga dorongan kepada seluruh pegawai dan client anak terlantar di UPTD perlindungan sosial. Dalam penggerakan kerjasama, komunikasi sangat diperlukan agar tejalin koordinsai yang baik antar pihak. Dengan adanya fungsi penggerakan yang dilakukan secara optimal akan membuat semua pegawai mau bekerja sama secara sadar dan bekerja dengan ikhlas.

Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan bagian terakhir dalam fungsi manajemen, dimana pengawasan berfungsi untuk mengendalikan dan mengawasi segala kegiatan baik kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan maupun pengendalian itu sendiri. (Mohamad Khadafi, 2020). Pengawasan perlu dan harus dilakukan dikarnakan kesalahan atau kekeliruan tidak bisa terlepas dari sifat lahiriah manusia. Pengawasan dilakukan agar terpantaunya proses pelayanan yang baik sesuai yang diharapkan. Dalam pengawasan UPTD perlindungan sosial dilakukan oleh

kepala UPTD perlindungan sosial, pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung adalah pengawasan yang secara langsung di saksikan oleh pimpinan dengan cara mengawasi berjalannya pelaksanaan program yang di ikuti oleh anak anak terlantar. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan bentuk laporan dari masing-masing pengurus. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak sirojudin selaku kepala UPTD Perlindungann sosial yang mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan di panti dengan cara pemberian laporan dari pengurus baik itu laporan lisan maupun tulisan.

Yang biasa disampaikan ketika melakukan rapat tiga bulan sekali dengan pendamping, pegasuh, juru masak, serta pendamping belajar di lingkungan panti perlindungan guna melakukan pengontrolan dan menerima laporan perkembangan anak anak terlantar selama mengikuti program di dalam panti. Semua pihak yang mendampingi anak diharapkan dapat penyampaian perkembangan serta hasil kegiatan yang selama ini dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan mengenai manajemen panti perlindungan sosial anak terlantar yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Sosial provinsi banten sudah cukup baik, dalam proses kegiatan pengelolaan dengan melakukan tahapan, meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pergerakan (actuating), dan pengawasan (contolling). sehingga proses pengelolaan kegiatan-kegiatan yang ada di panti perlindungan bisa berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi oleh panti UPTD perlindungan sosial provinsi banten seperti terbatasnya jumlah sumber daya manusia, dalam mendampingi anak dalam kesehariannya sedangkan jumlah anak yang menjadi penerima manfaat lebih banyak, dan belum terdapat pelatihan keterampilan secara khusus untuk anak yang dapat dijadikan sebagai bekal kemampuan saat anak selesai menerima pelayanan di panti UPTD perlindungan sosial provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, m. A. (2013). Dasar dasar manajemen. Retrieved from <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/bab2.pdf?sequence=11>
- Mohamad khadafi, n. (2020). Fungsi manajemen dakwah dalam kegiatan keagamaan di panti asuhan nahdhiyat kota makassar. Jurnal washiyah, 1(2), 248–260.
- Mubin, f. (2020). Pengertian, unsur, prinsip dan ruang lingkup perencanaan pendidikan. 1–12.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/q24jz>

Permensos no 4 tahun 2020:10. Peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar.

Syahputra, r. D., & aslami, n. (2023). Prinsip-prinsip utama manajemen george r. Terry. Manajemen kreatif jurnal (makreju), 1(3), 51–61.

Undang-undang Dasar 1945